

PERAN PEREKONOMIAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL BAGI KETAHANAN BANGSA

Farida Husin¹, Zaliah²

¹² UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya
faridahusin72@gmail.com, zaliah@polsri.ac.id

Abstrak

Di era reformasi dan dalam era global, maka tidak mengherankan jika berbagai aspek akan mempengaruhi ketahanan nasional baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta aspek pertahanan dan keamanan. Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi ekonomi bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, mandiri, berdaya saing tinggi, mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Pembangunan ekonomi diarahkan pada kemantapan ketahanan ekonomi melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan iptek, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan daya saing dalam lingkup perekonomian global.

Kata kunci: perekonomian bangsa, pembangunan nasional, ketahanan nasional

Abstract

In era of reform and in the global era Indonesian nation, it is no wonder if many aspects will affect the national defense both in terms of ideology, political, economic, social, and cultural aspects of defense and security. The realization economic resilience is reflected in the nation's economic condition is capable of maintaining a healthy economic stability and dynamic, independent, highly competitive, realize the prosperity of the people are fair and equitable. Economic development is directed on the stability of economic resilience through a healthy business climate and utilization of science and technology, availability of goods and services, maintenance of environmental functions, and improve competitiveness within the global economy.

Keywords: national economy, national development, national defense

1. Pendahuluan

Meningkatkan ketahanan nasional identik dengan pembangunannasional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visional untuk mengidentifikasi kondisi dalam rangka menjamin persatuan dan kesatuan, sedang ketahanan nasional menjamin persatuan dan kesatuan dengan mengantisipasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (AGHT).

Konsepsi Tannas Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD

1945, dan wawasan nusantara. Dengan kata lain, konsepsi Tannas Indonesia merupakan sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Bagi bangsa Indonesia konsep lepas landas tidak hanya berdimensi ekonomis, melainkan juga mempunyai dimensi-dimensi sumber daya manusia, budaya, sosial-politik dan lain-lain yang akhirnya akan bermuara pada budaya bangsa. Istilah lepas landas untuk pertama kali dipopulerkan oleh Rostow yang dikaitkan dengan tahapan pembangunan ekonomi suatu negara.

Suatu masyarakat akan lepas landas dalam tahap pembangunannya setelah melalui tahap yang disebut sebagai prasyarat untuk lepas landas (*precondition for take off*). Tahap prasyarat untuk lepas landas ini sebetulnya merupakan masa transisi suatu masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang berkembang. Pada masa transisi, masyarakat mempersiapkan diri meningkat secara otomatis. Setelah tahap ini dilalui — dengan kata lain, pada masa transisi semua syarat untuk lepas landas akan diciptakan dan dimantapkan sehingga akhirnya suatu masyarakat akan dapat lepas landas.

Masa transisi mempunyai beberapa dimensi, dan masyarakat yang pada mulanya secara mutlak menggantungkan hidup pada sektor pertanian mengubah sumber-sumber pendapatan ke sektor-sektor industri, komunikasi, perdagangan dan jasa. Dengan kata lain, dalam tahap ini kesempatan kerja tidak lagi didominasi oleh sektor pertanian, tetapi telah berpindah ke sektor-sektor ekonomi yang lain.

Di samping itu, kegiatan perdagangan tidak lagi terbatas dalam suatu daerah tertentu yang sempit, melainkan telah menjangkau daerah yang lebih luas, nasional bahkan internasional. Setiap warga negara dan seluruh rakyat Indonesia wajib menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional yang bersumber dari GBHN.

Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan kemampuan nasional, yang berarti meningkatnya ketahanan nasional dan mendorong pembangunan nasional agar makin lancar dan berhasil.

Penjabaran konsepsi ketahanan nasional dalam pembangunan nasional meliputi segenap aspek kehidupan secara terintegrasi, utuh dan menyeluruh adalah upaya untuk meningkatkan segenap unsur kekuatan nasional agar mampu

menghadapi berbagai bentuk ancaman dari mana pun datangnya.

Hakikat ketahanan nasional adalah pengaturan dan penyelenggaraan segenap aspek kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Konsepsi ketahanan nasional adalah memanfaatkan dan memadukan segenap potensi kehidupan nasional yang terdiri dari delapan gatra, yang digunakan dalam pengaturan dan penyelenggaraan, baik bagi kepentingan, kesejahteraan maupun keamanan dalam arti luas, menyeluruh dan terpadu, komprehensif dan integral berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan penjabaran Wawasan Nusantara melalui pembangunan nasional.

Ketahanan nasional Indonesia yang bertumpu pada ketahanan pribadi yang kuat dimulai dari rumah, keluarga, sistem nilai yang dianutnya (Pancasila dan UUD 1945) sampai budaya bangsa akan menjadikan seseorang memiliki ketahanan pribadi yang kuat. Ketahanan pribadi yang kuat akan tampak pada rasa percaya diri, akomodatif terhadap perubahan dan pembaruan, dan berjiwa besar.

2. Metode

Bidang ekonomi merupakan suatu bidang kegiatan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhannya di samping alas pemuas kebutuhan yang terbatas. Hal tersebut dalam ilmu ekonomi menyangkut berbagai bidang antara lain permintaan, penawaran, produksi, distribusi barang dan jasa.

Ketahanan pribadi yang didasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah hidupnya dalam berbangsa dan bernegara, akan menumbuhkan pribadi yang percaya pada diri sendiri dan mandiri, menghargai sesama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tetapi bebas dari rasa ketergantungan serta kepribadian yang dinamis, kreatif dan memiliki daya tahan, menggunakan sistem nilai dan agama yang dianutnya secara

nyata, nilai edukatif dari pendidikan formal dan informal serta nilai kebanggaan dan keagungan atas tradisi yang mencerminkan sebagai kekuatan budaya bangsa.

Istilah ketahanan nasional merupakan gagasan Bung Kamo yang diucapkan tahun 1958 di Kotaraja (kini Banda Aceh) setelah menerima defile. *Alangkah besar hati kite menerima jikalau satu bangsa ingin menjadi besar dan kuat, bangsa itu harus memenuhi tiga syarat, harus mempunyai tiga ketahanan: nomor satu ketahanan militer, nomor dua ketahanan ekonomi, nomor tiga ketahanan jiwa.*

Diambil dari latar belakang ini, maka akan dikaji bagaimana pengaruh perekonomian dalam pembangunan nasional pada ketahanan nasional bangsa Indonesia. Mengkaji ketahanan nasional harus dilihat dari dua sisi, yaitu kondisi sebagai masukan/modal dan konsepsi sebagai keluaran sekaligus kondisi untuk konsepsi yang akan datang.

3. Pembahasan

Ketahanan nasional bidang ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur.

Bidang ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan faktor-faktor lainnya yang saling berkaitan. Perekonomian selain berkaitan dengan wilayah geografi suatu negara, juga sumber kekayaan alam, sumber daya manusia, cita-cita masyarakat yang lazimnya disebut ideologi, akumulasi kekuatan, kekuasaan, serta kebijaksanaan yang akan diterapkan dalam kegiatan produksi dan distribusi. nilai sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang memberikan jaman lancarnya roda ke-

glatan ekonomi suatu bangsa. Proses tersebut akan mempunyai dampak positif dalam arti meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa manakala kegiatan ekonomi itu terselenggara dalam posisi keseimbangan antara permintaan dan penawaran, produksi, distribusi barang dan jasa (Parmono, 1995).

Gelombang globalisasi yang melanda dunia sejak tahun 1980, jauh berbeda dari segi intensitas dan cakupannya. Proses konvergensi yang kits saksikan akibat dari globalisasi dewasa ini praktis telah menyentuh berbagai sendi kehidupan, tidak saja menyangkut ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologi, melainkan juga telah menjamah ke tataran sistem, proses, aktor dan *events*, sekalipun prosesnya tidak berjalan mulus. Hal inilah yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi terutama di Indonesia pada, masa reformasi dewasa ini. Peristiwa pada suatu negara terutama negara besar yang berperan dalam bidang ekonomi akan mempengaruhi gelombang pasang surut perekonomian negara lain. Tragedi 11 September yang melanda gedung kembar WTC telah dirasakan membawa kelesuan perekonomian dunia (Faisal Basri, 1998). Oleh karena itu dewasa ini tidak satu negarapun yang mampu mengembangkan per-ekonomiannya bertumpu hanya pada negara tersebut, tanpa keterlibatan negara lain.

Pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Oleh karena itu, pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila secara berencana, bertahap dan berlanjut, yang terdapat dalam sila-sila Pancasila.

1. Pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan meletakkan

- landasan spiritual, moral dan etik yang kokoh.
2. Pengamalan sila kernalusiaan yang adil dan beradab, dalam rangka meningkatkan imartabat serta hak dan kewajiban asasi setiap warga negara.
 3. Pengamalan sila persatuan Indonesia, untuk memperkuat rasa kesetiakawanan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
 4. Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan, dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik demokrasi Pancasila.
 5. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam rangka mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan.

Ideologi dan sistem politik apa pun yang dianut oleh suatu bangsa dan negara, serta tata nilai budaya yang bagaimanapun yang menjiwai masyarakat dan bangsa, pada kenyataan tidaklah akan terwujud kalau bangsa itu sendiri tidak melakukan pengelolaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pengelolaan pembangunan nasional yang sekaligus sebagai politik nasional merupakan suatu pekerjaan yang besar dan kompleks sehingga diperlukan berbagai tahapan tindakan, sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan dan strategi pembangunan nasional;
2. perencanaan pembangunan nasional;
3. penyusunan program pembangunan nasional berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi;
4. penentuan dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan;
5. pelaksanaan administrasi pembangunan nasional;
6. pengawasan dan pengendalian pembangunan nasional.

Pengertian Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa,

yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia (Suradinata, 2005:47).

Bangsa Indonesia geostrategi dikembangkan demi tujuan bangsa dan Negara Indonesia yang bersifat mulia, yaitu kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

Oleh karena itu geostrategi Indonesia sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar asas kemanusiaan dan keadilan social. Dapat pula dikatakan bahwa geostrategi Indonesia adalah memanfaatkan segenap kondisi geografi Indonesia untuk tujuan politik, dan hal itu secara rinci dikembangkan dalam pembangunan nasional (Armawi, 2005: 1).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka geostrategi Indonesia diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khan wilayah tumpah darah negara Indonesia, maka geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk Ketahanan Nasional.

Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa serta dengan usaha meningkatkan tarafhidup masyarakat. Sistem ekonomi yang dianut suatu bangsa

akan memberi corak perekonomian negara. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi *pasar bebas murni* akan sangat peka terhadap pengaruh dari luar, sistem sosialis dengan pengendalian penuh dari pemerintah kurang peka dari pengaruh luar. Kini tidak ada sistem liberal murni maupun sosialis murni, negara liberal telah memasukkan unsur sosialis, negara sosialis juga telah memasukkan unsur liberal masing-masing dengan modifikasi yang disesuaikan dengan geografi negara yang bersangkutan.

Perekonomian Indonesia mengacu pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa *sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian untuk kesejahteraan bangsa. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan koperasi. Sistem ini tidak mengenai usaha monopoli maupun monopsoni oleh masyarakat maupun pemerintah.

Sistem ekonomi Indonesia juga disebut perekonomian kerakyatan. Kemakmuran rakyat yang dimaksud adalah kemakmuran rakyat Indonesia, termasuk

yang berada di pulau-pulau terpencil, di gunung, di tengah hutan. Negara harus memakmurkan rakyat setempat melalui pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada di daerah masing-masing. Dalam era globalisasi, suatu bangsa tidak mungkin menutup diri dari sistem ekonomi dunia, Indonesia juga terbuka terhadap perkembangan ekonomi dunia. Tingkat integrasi ini merupakan ukuran kemampuan ekonomi nasional untuk secara adaptif mengikuti irama dan dinamika pasar internasional. Keberanian Indonesia ikut *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)*, dan *Asia Pacific Economy Cooperation (APEC)* menunjukkan kemauannya menjadi bagian integral dan sistem pasar internasional.

Ketahanan ekonomi ialah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi AGHT dan luar maupun dalam, langsung dan tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi ekonomi bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, mandiri, berdaya saing tinggi, mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Pembangunan ekonomi diarahkan pada kemantapan ketahanan ekonomi melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan iptek, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan daya saing dalam lingkup perekonomian global. (Minto Rahayu, 2007).

Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai hal.

1. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran dan

- kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah nusantara melalui ekonomi kerakyatan serta untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Ekonomi kerakyatan harus menghindari
 - a. *sistem free fight liberalism* yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat,
 - b. *sistem etatisme, negara dan aparatur ekonomi negara bersifat dominan dan mendesak, mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara,*
 - c. *pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.*
 3. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antara sektor pertanian, perindustrian dan jasa.
 4. Pembangunan ekonomi yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan antar-pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah, badan usaha milik negara, koperasi, badan usaha swasta, dan sektor informal harus diusahakan demi mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi.
 5. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian ekonomi nasional; dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal serta sarana iptek yang tepat guna dalam menghadapi setiap

masalah dan dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja.

6. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor.

Dengan demikian, ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan ekonomi bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian Indonesia didasarkan pada budaya bangsa yang sifatnya integratif. Oleh karena itu, perekonomian bersifat kolektif antara para pelaku ekonomi, yaitu swasta, BUMN dan koperasi. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, usaha, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara individu maupun kelompok dengan cara atau alat yang dipergunakan cfi dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Bagi negara berkembang menganut sistem perekonomian campuran yang intinya berupa penerapan mekanisme pasar dengan modifikasi seperlunya serta pemberian insentif untuk mendorong produktivitas. Perekonomian masih sangat bergantung pada pasar, modal dan investasi yang datang dari luar. Lewat pembangunan Indonesia berusaha agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus atas kekuatan sendiri (*self sustaining growth*).

Negara dengan segenap potensi sumber daya alamnya memberikan peluang untuk dapat dimanfaatkan demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk ini, diperlukan kemampuan suatu negara terhadap modal

dan pengelolaan sumber dana, perencanaan tingkat nasional, masalah lingkungan hidup, penguasaan teknologi (technical knowhow), dan tersedianya pasar. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan, harus bercirikan sebagai berikut.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokokpokok kemakmuran rakyat dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Berbagai faktor yang berpengaruh yang perlu mendapat perhatian antara lain bahwa perkembangan dunia sangatlah cepat diakibatkan kemajuan iptek, yang memberikan dampak pada tatanan ekonomi dunia.

Bagi suatu negara, dengan perubahan suasana perekonomian yang global juga akan berpengaruh dalam menciptakan kondisi, situasi serta akibat yang berbeda terhadap kehidupan ekonomi suatu negara.

4. Kesimpulan

Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan kemampuan nasional, berarti meningkatnya ketahanan nasional dan mendorong pembangunan nasional agar makin lancar dan berhasil.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi ekonomi bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi

yang sehat dan dinamis, mandiri, berdaya sang tinggi, mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Pembangunan ekonomi diarahkan pada kemantapan ketahanan ekonomi melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan iptek, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan daya saing dalam lingkupperekonomian global.

DAFTAR PUSTAKA

- Armawi, Armaedi, 2006, *Geostrategi Indonesia*, Makalah Pelatihan Dosen Kewarganegaraan, 2006, Dikti, Surabaya.
- Basri Faisal, 1998, *Krisis Ekonomi Indonesia, Antara Gelombang Globalisasi dan Tuntutan Reformasi Total*., dalam *Menuju Indonesia Baru*, (ed.) Musa Kazhim, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Pramono, R, 1995, *Ketahanan Nasional*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Rahayu Minto, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Grasindo.
- Suradinata, Ermaya, 2005, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*, Suara Bebas, Jakarta.